



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 66);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 66) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 91

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 91 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Perubahan Rencana Kerja yang memuat hasil evaluasi Rencana Kerja tahun berjalan. Fungsi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah untuk satu tahun ke depan. Selain itu digunakan untuk pengukuran kinerja dan untuk mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Periode tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan yang meliputi evaluasi pencapaian target program/kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Disamping itu pula dilakukan penelaahan terhadap Visi, Misi serta Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tela'ahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa barat dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat agar di dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pertanian bagi seluruh elemen Dinas Pertanian Kabupaten Garut.

Adapun tema pembangunan pada tahun 2023 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2023 untuk sektor pertanian yaitu pada peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan serta pariwisata dan jasa produktif lainnya. Dinas Pertanian sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Garut yang bertanggungjawab didalam pengembangan komoditas pertanian akan melakukan langkah-langkah strategis guna pencapaian masyarakat madani daerah sekitar pertanian yang mandiri dan tangguh dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui penggalian potensi sumber daya alam, serta mengembangkan agro ekonomi dalam bentuk agribisnis pedesaan secara berkelanjutan.

### **1.1.2. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan Renstra Kementerian Pertanian**

Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Garut sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian. Beberapa Kebijakan yang sinergis dengan kebijakan di Kabupaten Garut antara lain :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- c. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- d. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian,
- e. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dan
- f. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

### **1.1.3. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat**

Tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis.

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan

demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan yaitu : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sasaran yaitu : Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Menengah Jawa Barat.

### **1.1.3. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut dengan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**

Tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan merupakan arah bagi pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan perkebunan melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan perkebunan. Perumusan tujuan pembangunan perkebunan Jawa didasarkan pada tinjauan kebijakan yang lebih tinggi di tingkat pusat serta karakteristik perkebunan Jawa Barat itu sendiri. Adapun tujuan pembangunan perkebunan periode tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha Perkebunan Jawa Barat”.

Adapun Sasaran pembangunan perkebunan Jawa Barat yang akan dicapai selama periode 2024-2026 adalah:

1. Meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan;
2. Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur, belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluhan, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih

rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar bidang terkait pembangunan pertanian.

Disamping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara seimbang, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan, mengupayakan pencapaian yang mencakup angka kemiskinan dan pengangguran, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi : tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut pada tahun 2023. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja ini merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian pada tahun 2023 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi antar bidang dan sektor terkait (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial).

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

- tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235); Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023;
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk dijadikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur pertanian dan pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Garut yang berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan visi dan misi Bupati Garut Tahun 2019-2024.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan perencanaan penganggaran.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan pertanian yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

**Bab I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, maksud, tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023.

**Bab II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II**

Menyampaikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023, Evaluasi Semester I Tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Garut, analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Review terhadap RKPD Perubahan.

**Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Merupakan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan.

**BAB IV : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN HASIL RENJA DINAS PERTANIAN**  
**SEMESTER I TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Semester I Tahun 2023**

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Garut melaksanakan sebanyak 6 program dan 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan anggaran atau pagu sebesar Rp. 79.989.233.989,-

Adapun anggaran dan realisasi program Semester I Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Semester 1 Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023

<b>Program</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Semester I</b>	<b>%</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	79.989.233.989	20.695.393.360	25,87
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.458.367.352	14.094.641.716	43,32
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,393,374,000	404,421,860	16.90
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	32.437.450.000	5.170.982.600	15.94
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	431.560.000	194.852.942	45.15
Program Perizinan Usaha Pertanian	295.000.000	44.330.000	15.03
Program Penyuluhan Pertanian	11.973.482.637	786.164.242	6,57

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023

Masih ada kelemahan yang harus diperbaiki Dinas Pertanian Kabupaten Garut untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kegagalan tersebut, sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

**Tabel 2.2.**  
**Evaluasi Hasil terhadap**  
**Renja Dinas Pertanian Kabupaten Garut**  
**Semester I Tahun 2023**

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)					
											I		I		K		Rp. (000)		K		Rp.	
											K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2				3	4	5		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	2	7			PERTANIAN																	
3	2	7			DINAS PERTANIAN		115,668,616		79,989,227		10,237,162		10,458,231		20,695,393							
3	2	7	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	%	30,364,616		32,458,362		5,286,599		8,808,042		14,094,641					
3	2	7	0	1	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	%	369,949	72	181,400		50,369		37,903		88,272			
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	138,424	5	106,400	1	36,847	1	24,308	2	61,155	40.00	57.48		
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Dokumen	231,525	5	75,000	1	13,522	1	13,595	2	27,117	40.00	36.16		
3	2	7	0	1	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	65	%	27,792,923	65	28,273,833		4,884,812		8,377,159	-	13,261,971	-	46.91	

				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	27,792,923	12	28,273,833	3	4,884,812	3	8,377,159	6	13,261,971	50.00	46.91
3	2	0	2	03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	65 %	223,422	65	370,479		-		-	-	-	-	-
				02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan	7 Orang	223,422	12	370,479	0	-		-	-	-	-	-
3	2	0	2	05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik</b>	90 %	267,411	90	134,253		32,139		26,531	-	58,670	-	43.70
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang di laksanakan	1 Jenis	176,248	1	76,500		32,139		7,280	-	39,419	-	51.53
				10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	2 Kali	91,163	1	57,753		-		19,251	-	19,251	-	33.33
3	2	0	0		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	65 %	656,373	65	930,704		289,527		201,489	-	491,016	-	52.76
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Unit/Jenis	18,233	4	17,616	4	17,616		-	4	17,616	100.00	100.00
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Unit/Jenis	158,016	8	106,758	8	105,948		-	8	105,948	100.00	99.24
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Unit/Jenis	60,775	8	58,453	4	27,403	1	10,350	5	37,753	62.50	64.59
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 Jenis	66,853	178	28,597	47	7,050	47	7,050	94	14,100	52.81	49.31
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	1500 Orang	60,775	2100	77,192	600	25,210	300	14,569	900	39,779	42.86	51.53
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 Kali	121,551	250	642,088	25	106,300	35	169,520	60	275,820	24.00	42.96
						Honorarium Tenaga Honorer		170,171	14		3				3	-	21.43	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	177.86	258.80
Predikat kinerja																	ST	ST

3	2	0	0		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>694,922</b>		<b>1,636,424</b>		<b>-</b>		<b>132,248</b>	<b>-</b>	<b>132,248</b>			
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	2	Jenis/Unit	60,775	2	136,424	0	-	132,248	-	132,248	100.00	96.94	
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3	Jenis/Unit	634,147	1	1,500,000	0	-	-	-	-	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																260.49	314.89		
Predikat kinerja																ST	ST		
3	2	0	0		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan</b>		<b>207,678</b>		<b>321,016</b>		<b>20,710</b>		<b>19,852</b>	<b>-</b>	<b>40,562</b>			
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	1,325	Lembar	3,647	1,325	3,306	350	700	750	350	1,450	26.42	43.86	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	Bulan	151,938	12	137,805	3	20,010	19,102	3	39,112	25.00	28.38	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	Bulan	52,093	12	179,905	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																364.45	383.50		
Predikat kinerja																ST	ST		
3	2	0	0		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan</b>		<b>419,350</b>		<b>610,253</b>		<b>9,042</b>		<b>12,860</b>		<b>21,902</b>			
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	15	Unit	206,636	15	133,815	2	9,042	2	10,970	4	20,012	26.67	14.95
						Perpanjangan STNK dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional	254	Unit		254		55	57		112	-	44.09		
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	10	Unit	30,388	10	27,503	-	-	1,890	-	1,890	-	6.87	

						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhab	2	Unit	182,326	1	448,935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		382.14	382.73
																			Predikat kinerja		ST	ST
3	2	0				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya</b>	<b>0.125</b>	<b>point</b>	<b>33,034,500</b>	<b>0.125</b>	<b>2,393,373</b>		<b>268,832</b>		<b>135,590</b>		<b>404,422</b>				
3	2	0	0			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Indeks pemanfaatan saprodi	100	%	25,023,000	100	1,890,265		39,270		46,650		85,920				
				01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bantuan sarana produksi pertanian	5	Jenis	4,500,000	5	468,221		30,140	1	26,082	1	56,222		20.00		12.01
							Jumlah alat mesin pertanian yang tersedia	4	Jenis									-	-			
				02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bantuan sarana produksi	4	Jenis	4,500,000	4	1,422,044	-	9,130	-	20,568	-	29,698		-		2.09
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		296.26	291.46
																			Predikat kinerja		ST	ST
3	2	0	0			<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Ketersediaan Benih</b>	<b>2</b>	<b>%</b>	<b>8,011,500</b>		<b>503,108</b>		<b>229,562</b>		<b>88,940</b>		<b>318,502</b>				
				01		Penjaminan Kemurnian dan	Demplot tanaman pertanian	50	Ha	2,229,675	4,554	197,827		84,581	10	34,096	10	118,677		0.22		59.99



						Pemeliharaan Embung Pertanian													
			03			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usahatani	15	Lokasi	5,550,000	15	4,367,000	12,970	14,820	-	27,790	-	0.64	
			04			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit	12	Lokasi	5,550,000	12			-	-	-	-		
			09			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	UPLAND	1	keg	22,925,000	1	22,094,350	4,315,218	776,321	-	5,091,539	-	23.04	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	108.76	105.39	
Predikat kinerja																	ST	ST	
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>				<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana</b>	<b>10</b>	<b>%</b>	<b>570,000</b>	<b>10</b>	<b>431,560</b>	<b>161,233</b>	<b>33,620</b>	<b>194,853</b>				
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>% Luasan lahan yang diintervensi</b>	<b>2</b>	<b>%</b>	<b>570,000</b>	<b>2</b>	<b>431,560</b>	<b>161,233</b>	<b>33,620</b>	<b>194,853</b>				
						01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Laporan Hasil Pengamatan	1	Dokumen	340,000	696,752	188,737	129,715	14,305	-	144,020	-	76.31
								Penyediaan Saprodi untuk kebencanaan pertanian	5	jenis				5	5	-			
						01	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengamatan dan aksi penengendalian	5	keg	230,000	696,752	242,823	31,518	19,315	-	50,833	-	20.93
								Pengelolaan budidaya tanaman terpadu	1	keg									
Rata-rata capaian kinerja (%)																	83.34	115.78	

														Predikat kinerja		ST	ST		
3	2	0			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	50	%	180,000	50	295,000		41,250		3,080		44,330		
3	0	0	0		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	% ijin usaha yang ditindaklanjuti	100	%	180,000	100	295,000		41,250		3,080		44,330		
				02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	dokumen standar publik izin usaha pertanian	1	Dokumen	180,000	1	295,000		41,250		3,080	-	44,330	-	15.03
3	2	0			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10	%	5,891,000	10	11,973,482	-	146,920		639,244		786,164		
3	0	0	0		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	1. kebutuhan penyuluh tersertifikasi 2. kebutuhan untuk naik kelas utama	10	%	5,891,000	10	11,973,482	-	146,920		639,244		786,164		
				01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pengembangan daerah irigasi secara terpadu	1	keg	2,396,000	1	971,750		57,198		379,234	-	436,432	-	44.91
						Peningkatan kapasitas penyuluh	250	Orang		250	-		150		150	-		60.00	
				02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah petani yang dilatih	100	Orang	1,425,000	100	934,200		89,722		154,487	-	244,209	-	26.14
						Peningkatan kapasitas pelaku utama	100	Orang		100			30		30	-		30.00	
				03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Posluhdes yang menerima bantuan	4	kelompok	1,150,000	4	9,667,532		-		105,524	-	105,524	-	1.09
						Jumlah sarana penyuluhan yang diberikan	5	jenis		5					-	-	-	-	
				04	Pembentukan dan Penyelenggaraan	Demplo/kaji terap inovasi teknologi pertanian terpadu	25	hektar	920,000	25	400,000		-		-	-	-	-	-

					Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
					Kegiatan Sekolah Lapang	5	keg		5						-	-	-		
																Rata-rata capaian kinerja (%)	315.71	296.47	
																Predikat kinerja	ST	ST	

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 di atas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Dinas Pertanian Kabupaten Garut terdapat realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023. Hal ini disebabkan sebagian besar pengadaan masih dalam proses , spesifikasi barang serta ketersediannya cukup sulit dan sebagian besar anggaran dipindahkan, terkait adanya perubahan kedalaman Dokumen dan Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Dinas Pertanian Kabupaten Garut tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah barang yang akan dihibahkan masih jarang tersedia disesuaikan dengan waktu tanam serta Spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang ada di e-catalog serta adanya perubahan kedalaman dan tujuan pelaksanaan kegiatan sehingga diperlukan perubahan anggaran untuk pelaksanaannya,
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Implikasi yang timbul dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut terhadap target capaian program Renstra, secara keseluruhan program dapat terealisasi walaupun dilaksanakan berdasarkan anggaran perubahan, sehingga target capaian program Renstra SKPD dapat terpenuhi.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/ kegiatan adalah Perlunya perencanaan yang lebih matang sehingga tidak ada perencanaan kegiatan yang muncul

setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran di sahkan menjadi Dokumen dan Pelaksanaan Anggaran.

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Garut Tahun 2023.

## **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD**

Seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Indikator Kinerja Utama dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Garut menetapkan 3 sasaran pembangunan yaitu pada Rencana Kerja 2023 yaitu :

1. Meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan SKPD

Pada tahun 2023, sesuai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 113 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama menjadi :

1. Meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

**Tabel. 2.3. Indikator dan Sasaran Kinerja**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2	3		4	5	
Meningkatnya produksi komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1.	Produksi Padi	474,874	552,764	116.40
	2.	Produksi Jagung	409,248	396,849	96.97
	3.	Produksi Cabai	102,027	64,436	63.16
	4.	Produksi Bawang Merah	22,194	58,517	263.66
	5.	Produksi Kentang	107,283	110,440	102.94
	6.	Produksi Jahe	3,650	761	20.85
	7.	Produksi Jeruk	85,822	55,075	64.17
	8.	Produksi Kopi	1,481	1,469	99.20
	9.	Produksi Teh	3,105	3,822	123.08
	10.	Produksi Tembakau	1,505	1,533	101.84

Sumber : Data Statistik Dinas Pertanian Pertanian 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa dari 10 indikator, ada 2 indikator yang angka capaian dibawah 50%. Indikator yang belum mencapai target adalah Produksi Jahe dan Produksi Jeruk. Untuk Jahe sampai akhir semester 1 target belum tercapai karena panen raya terjadi memasuki awal semester 2 sedangkan untuk jeruk karena memang terjadi penurunan luas tanam dikarenakan secara hitungan ekonomis kurang menguntungkan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian;
- Kelembagaan perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Peningkatan kemampuan kelembagaan petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Peningkatan ketersediaan sarana produksi pertanian;
- Pengembangan pola kemitraan dengan petani penangkar;
- Pelestarian dan pemanfaatan agens hayati dan pestisida nabati;
- Pengelolaan air dan tanah berwawasan lingkungan dan berkesinambungan;

- Pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi yang berwawasan lingkungan; dan
- Alih fungsi lahan pertanian.

### **2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.**

- **Permasalahan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- a) Alih fungsi lahan (sawah) dan kerusakan lingkungan yang cenderung semakin meningkat dan sulit dikendalikan
- b) Belum optimalnya pemanfaatan lahan
- c) Penurunan kualitas lahan (kesuburan tanah), akibat penggunaan pupuk kimia secara terus menerus
- d) Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit
- e) Penerapan teknologi panen dan pasca panen oleh petani masih rendah dan tingkat kerusakan waktu panen masih tinggi yang lebih disebabkan karena kurangnya sarana pendukung
- f) Penyediaan sarana produksi masih terbatas, harga sarana produksi cenderung semakin meningkat terutama untuk pupuk dan pestisida yang tidak diikuti dengan adanya kenaikan harga di tingkat petani
- g) Fenomena iklim/anomali iklim yang sulit diprediksi
- h) Produktivitas padi, palawija dan hortikultura belum maksimal yang disebabkan oleh tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)
- i) Masih lemahnya dukungan infrastruktur terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani untuk kepentingan proses produksi dan pemasaran
- j) Lemahnya pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi yang tertuang dalam peraturan Bupati, karena cenderung pembelian pupuk bersubsidi masih berpusat disentra-sentra ekonomi
- k) Belum terbangunnya system perbenihan di daerah/desa secara terstruktur mengakibatkan lemahnya distribusi
- l) Belum tertatanya kelembagaan usaha tani sehingga belum berperan sesuai harapan dalam menjalankan fungsinya menjalin

kemitraan, baik aspek pemasaran, permodalan maupun pengembangan usahanya

- m) Kelembagaan petani belum berbadan hukum
- n) Tingginya fluktuasi harga sulit dikendalikan sebagai akibat dari fluktuasinya permintaan dan penawaran produk yang disebabkan oleh berbagai factor seperti kekurangan pasokan pada musim tertentu atau kelebihan pasokan pada musim panen raya.

- **Upaya Pemecahan**

Upaya untuk pemecahan permasalahan di atas antara lain:

- a) Sosialisasi peraturan perundangan-undangan alih fungsi lahan terhadap stakeholder dan masyarakat;
- b) Penentuan alokasi luas lahan pertanian pada penyusunan RTRW;
- c) Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura yang berwawasan lingkungan;
- d) Meningkatkan penanganan rawan bencana longsor pada daerah-daerah rawan longsor melalui kegiatan pelatihan konservasi untuk peningkatan kualitas SDM petani disekitar daerah konservasi lahan dan konservasi daerah aliran sungai dan pengadaan bibit tanaman buah-buahan untuk ditanam disekitar daerah konservasi;
- e) Meningkatkan produktivitas lahan dan lahan tidur melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP) atau intensitas tanam dan peningkatan produktivitas berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
- f) Diversifikasi usaha petani ke agroindustri melalui peningkatan kualitas dan daya saing hasil produk pertanian dengan cara pelatihan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian untuk peningkatan kualitas SDM petani dan pengadaan sarana dan prasarana seperti peralatan dan mesin yang berstandar SNI sesuai dengan GAP, GHP, GMP dan HCCP dan penguatan sarana pendukung pengolahan hasil;
- g) Melakukan pemberian hibah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan sarana produksi untuk kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan

- produktivitas dan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- h) Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui kegiatan SLPTT, SLPHT, SRI, penerapan budidaya sesuai SOP/GAP dan SLI (Sekolah Lapang Iklim) untuk mengantisipasi dampak fenomena iklim/perubahan cuaca yang tidak menentu;
  - i) Melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur terutama jaringan irigasi desa dan jalan usaha tani.

### **2.3.2 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.**

Dalam rangka mewujudkan Tujuan maupun Sasaran Organisasi, maka untuk Penentuan program dan kegiatan, dilakukan secara cermat, efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil (outcome). Adapun tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya mineral, adalah sebagai berikut:

- **Tantangan**

Berdasarkan analisa indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut, analisa Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan analisis KLHS, maka tantangan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

- ✓ Alih fungsi lahan khususnya sawah kerusakan lingkungan terus meningkat.
- ✓ Pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat yang sesuai dengan spesifik lokasi belum optimal.
- ✓ Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan serta ramah lingkungan belum optimal.
- ✓ Pendukung infrastruktur jaringan irigasi desa, jalan usahatani dan jalan produksi masih belum optimal.
- ✓ Koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.

- **Peluang Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut**

Peluang pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Garut terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ✓ Sosialisasi dan implementasi Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- ✓ Penyediaan benih tananam pangan dan hortikultura yang bersertifikat sesuai dengan spesifikasi lokasi masih dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Kabupaten Garut.
- ✓ Pengembangan teknologi tepat guna yang memanfaatkan benih bersertifikat dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih dapat dikembangkan.
- ✓ Pengembangan infrastruktur khususnya jaringan irigasi desa, jalan usahatani dan jalan produksi masih dapat ditingkatkan.
- ✓ Stakeholder pembangunan pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas masih dapat didayagunakan sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

Program/ kegiatan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan hasil dari usulan Dinas (Teknokratis) dan hasil musrenbang tingkat Kecamatan. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 perlu direviu dan dianalisis secara cermat agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil (outcome).

Dalam menetapkan rancangan rencana kerja Tahun 2023, Dinas Pertanian Kabupaten Garut wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program,

dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/ tugas yang melekat pada Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain : forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti : Musrenbangnas di tingkat Nasional, Musrenbang di tingkat Propinsi, Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang tingkat Desa, forum – forum lintas pelaku, dan konsultasi publik. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Garut maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum – forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing – masing. Pada akhir tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya; Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Reviu dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

- b. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan:
- c. Catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator kinerja dengan RKPD dan lainnya.

Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Rencana Kerja Dinas Pertanian serta target kinerja kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada table 2.4. berikut ini :

.

Tabel 2.4.  
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Garut  
Semester I Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										80,448,885,752	79,158,113,330			106,852,642,000		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										32,602,693,515	32,078,865,693			33,688,142,000		
3	27	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										181,400,000	181,400,000			708,495,000		
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	106,400,000	106,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	138,424,000
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	66,550,000
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	66,550,000
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan	Persentase pelayanan administrasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan	Kab. Garut, Tarogong	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-	Persentase pelayanan administrasi	100 %	35,000,000

					DPA- SKPD	keuangan dan umum	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	kinerja SKPD sesuai ketentuan	Kidul, Sukagalih									Dana Alokasi Umum		keuangan dan umum			
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		97,241,000
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		73,205,000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		231,525,000
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>28,214,069,600</b>	<b>27,042,712,778</b>					<b>27,792,923,000</b>	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	200 Orang/bulan	200 Orang / bulan	100 %	100 %	28,214,069,600	27,042,712,778	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %		27,792,923,000



3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	121,551,000	
3	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	420 Orang	420 Orang	100 %	100 %	57,753,300	57,753,300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	91,163,000	
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	420 Orang	420 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	109,395,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														<b>1,134,795,403</b>	<b>930,705,403</b>			<b>741,762,000</b>	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	17,616,500	17,616,500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	18,233,000
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	106,758,303	106,758,303	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	100 %	158,016,000

3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 % 100 %	60,775,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	58,453,400	58,453,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 % 100 %	66,853,000
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	28,597,200	28,597,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 % 100 %	60,775,000
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 % 100 %	30,388,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	110,302,000	77,192,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 % 100 %	121,551,000

3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 % 100 %	813,068,000	642,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 % 100 %	170,171,000
3	27	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 % 100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 % 100 %	55,000,000
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>										<b>1,636,424,600</b>	<b>2,488,043,600</b>				<b>2,396,630,000</b>
3	27	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	90 % 90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	425,427,000
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	90 % 90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	243,101,000
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	90 % 90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	182,326,000
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	90 % 90 %	136,424,600	136,424,600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	60,775,000



							Disediakan																
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	179,906,750	179,906,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	52,093,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>610,253,000</b>	<b>610,253,000</b>					<b>619,909,000</b>		
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	240 Unit	240 Unit	90 %	90 %	133,814,800	133,814,800	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	206,636,000	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	240 Unit	240 Unit	90 %	90 %	27,503,200	27,503,200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	30,388,000	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	18,233,000	

3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	182,326,000
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	90 %	90 %	448,935,000	448,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	182,326,000
3	27	1	2,11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>										0	0					<b>110,003,000</b>
3	27	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	100 %	100 %	300 Paket	300 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	100 %	110,003,000
3	27	02			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>										<b>2,278,600,000</b>	<b>1,361,755,000</b>					<b>17,011,500,000</b>
3	27	2	2,01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>										<b>1,775,491,350</b>	<b>858,646,350</b>					<b>9,000,000,000</b>

3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah Bantuan Sarana Produksi Jumlah Pengawasan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Indeks pemanfaatan saprodi	Kab. Garut, Semu Kecamatan, Semu Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kaler, Jati Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit Kab. Garut, Kadungora, Semu Kelurahan Kab. Garut, Kadungora, Tanggulu n Kab. Garut, Cibatu, Sukalilah Kab. Garut, Cibatu, Karyamukti Kab. Garut, Malangbo ng, Baru Dua Kab. Garut, Bayongbo ng, Cinisti	0.12 5 poin	0.12 5 poin	3 Jenis 0 Laporan 1 Laporan	3 Jenis 0 Laporan 1 Laporan	100 %	100 %	349,596,950	468,220,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	0.1 25 poin	4,500,000,000
---	----	----	------	----	---	--	--	----------------------------	--	-------------------	-------------------	---	--	----------	----------	-------------	-------------	---	--	-------------------	---------------

									Kab. Garut, Cisurupan , Simpangs ari Kab. Garut, Sukaresm i, Cintadam ai Kab. Garut, Sukaresm i, Sukalilah Kab. Garut, Cikajang, Cikajang Kab. Garut, Cikajang, Simpang Kab. Garut, Cikajang, Cikandan g											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah bibit kol Jumlah bibit palawija Jumlah bibit tanaman pangan dan hortikultura Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah sarana produksi kentang	Indeks pemanfaatan saprodi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaras Kab. Garut, Leles, Margaluyu Kab. Garut, Karangtengah , Cintamank Kab. Garut, Cisurupan , Kramatwangi Kab. Garut, Cisurupan , Pamulihan Kab. Garut, Cikajang, Mekarjaya Kab. Garut, Cikajang, Cipangramatan Kab. Garut,	0.125 poin	0.125 poin	1 Paket 1 paket 5 Jenis 1 Laporan 2 paket	1 Paket 1 paket 5 Jenis 1 Laporan 2 paket	100 %	100 %	1,425,894,400	390,425,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	0.125 poin	4,500,000,000
---	----	----	------	----	--	--	--	----------------------------	--	------------	------------	---	---	-------	-------	---------------	-------------	--------------------------------------	--	------------	---------------

									Mekarmu kti, Semua Kelurahan Kab. Garut, Cisewu, Cisewu Kab. Garut, Cibiuk, Lingkung pasir													
3	27	2	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											503,108,650	503,108,650					8,011,500,000
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Indeks Ketersediaa n Sarana yang sesuai peruntukan nya	Jumlah SDG Hewan/Tanam an yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Indeks Ketersediaan Benih	Kab. Garut, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	0.12 5 poin	0.12 5 poin	1 Dokum en	1 Doku men	2 %	2 %	197,827,400	197,827,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Ketersediaa n Sarana yang sesuai peruntukan nya	0.1 25 poi n	2,229,675,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Indeks Ketersediaa n Sarana yang sesuai peruntukan nya	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanam an	Indeks Ketersediaan Benih	Kab. Garut, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	0.12 5 poin	0.12 5 poin	1 Dokum en	1 Doku men	2 %	2 %	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Indeks Ketersediaa n Sarana yang sesuai peruntukan nya	0.1 25 poi n	4,306,575,000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaata n SDG Hewan/ Tanaman	Indeks Ketersediaa n Sarana yang sesuai peruntukan nya	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanam an	Indeks Ketersediaan Benih	Kab. Garut, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	0.12 5 poin	0.12 5 poin	1 Dokum en	1 Doku men	2 %	2 %	155,281,250	155,281,250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembaka u (CHT)		Indeks Ketersediaa n Sarana yang sesuai peruntukan nya	0.1 25 poi n	1,475,250,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											32,579,350,000	33,017,450,000					48,628,000,000
3	27	3	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian											790,000,000	1,153,100,000					1,628,000,000

3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Indeks Keberlanjutan LP2B	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	0.34 poin	0.34 poin	790,000,000	1,153,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	503,500,000
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Indeks Keberlanjutan LP2B	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	0.34 poin	0.34 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	414,000,000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Indeks Keberlanjutan LP2B	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Laporan	1 Laporan	0.34 poin	0.34 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	412,000,000
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Indeks Keberlanjutan LP2B	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	0.34 poin	0.34 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	298,500,000
3	27	03	2.02		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>										<b>31,789,350,000</b>	<b>31,864,350,000</b>				<b>47,000,000,000</b>	

3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Banyuwangi, Karyasari Kab. Garut, Pasirwangi, Semua Kelurahan Kab. Garut, Malangbong, Sakawang Kab. Garut, Malangbong, Cilampuyang Kab. Garut, Bayongbong, Sukamalah Kab. Garut, Cigedug, Cigedug Kab. Garut, Sukaresmi, Cintadamai Kab. Garut, Cibalong, Sagara Kab. Garut,	0.103 poin	0.103 poin	20 Unit	20 Unit	0.31 poin	0.31 poin	5,214,000,000	5,289,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	5,550,000,000
---	----	----	------	----	--	---	--	---	---	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------	---------------	---------------	---	---	------------	---------------

									Cikelet, Kertamukti, Kab. Garut, Pakenjeng, Panyindangan, Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya, Kab. Garut, Selaawi, Cirapuhan, Kab. Garut, Selaawi, Mekarsari												
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	0.31 poin	0.31 poin	114,000,000	114,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	5,550,000,000
3	27	3	2.02	3	Pembangunan Rehabilitasi dan, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Garut, Wanaraja, Sindangm	0.103 poin	0.103 poin	21 Unit	21 Unit	0.31 poin	0.31 poin	4,367,000,000	4,367,000,000	Dana Transfer Umum-Dana  Alokasi Umum DAK Fisik  Bidang Pertanian - Penugas	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	5,550,000,000





3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Unit	1 Unit	0.31 poin	0.31 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	5,550,000,000
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Unit	1 Unit	0.31 poin	0.31 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	650,000,000
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Unit	1 Unit	0.31 poin	0.31 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	950,000,000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Unit	1 Unit	0.31 poin	0.31 poin	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	275,000,000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Indeks pemenuhan aksesibilitas ke lahan pertanian	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.103 poin	0.103 poin	1 Unit	1 Unit	0.31 poin	0.31 poin	22,094,350,000	22,094,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugas	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	0.103 poin	22,925,000,000



3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	% Luasan lahan yang diintervensi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	10%	1 Laporan	1 Laporan	2%	2%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	10%	165,000,000
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	% Luasan lahan yang diintervensi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10%	10%	1 Laporan	1 Laporan	2%	2%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	10%	165,000,000
3	27	6			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>											295,000,000	213,760,000				280,000,000
3	27	6	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											295,000,000	213,760,000				280,000,000
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	% ijin usaha yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%	100%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	50%	50,000,000
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	% ijin usaha yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50%	50%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	295,000,000	213,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	50%	180,000,000

3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diberikan	Alat Pengolahan Kopi Huler Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Penggilingan padi	% izin usaha yang ditindaklanjuti	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pasawahan Kab. Garut, Kadungora, Cikembulan Kab. Garut, Malangboing, Cisitu Kab. Garut, Cikajang, Cikajang Kab. Garut, Cikajang, Padasuka Kab. Garut, Mekarmukti, Jayabaya Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	50 %	50 %	6 Unit 1 Unit 1 Laporan 1 Unit	6 Unit 1 Unit 1 Laporan 1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diberikan	50 %	50,000,000
3	27	7			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>										12,243,242,237	11,973,482,637		6,226,000,000			
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										12,243,242,237	11,973,482,637		6,226,000,000			

3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kebutuhan penyuluh tersertifikasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	42 Unit	42 Unit	42 unit	42 unit	1,229,750,000	971,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10 %	2,396,000,000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kebutuhan penyuluh tersertifikasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	42 Unit	42 Unit	42 unit	42 unit	944,190,237	934,200,237	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10 %	1,425,000,000

3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	kebutuhan penyuluh tersertifikasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	42 Unit	42 Unit	42 unit	42 unit	9,669,302,000	9,667,532,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pertanian - Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10 %	1,150,000,000
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	kebutuhan penyuluh tersertifikasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	42 Unit	42 Unit	42 unit	42 unit	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10 %	335,000,000
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	kebutuhan penyuluh tersertifikasi	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	10 %	42 Unit	42 Unit	42 unit	42 unit	400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	10 %	920,000,000
<b>TOTAL</b>																<b>80,448,885,752</b>	<b>79,158,113,330</b>				<b>106,852,642,000</b>

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

##### **3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut mengacu kepada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Garut 2019-2024 merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. RPJMD Kabupaten Garut merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SKPD dan RKPD Kabupaten Garut tahunan. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan seperti APBD II, APBD, DAK serta DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perumusan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut tahun 2023 dilakukan dengan menyelaraskan tujuan, sasaran kabupaten, visi misi Kabupaten Garut 2019-2024 serta RKPD perubahan tahun 2023. Adapun Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 yang mengalami perubahan sesuai arahan dari pimpinan terjadi pada program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pada sub kegiatan:
  - 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula pagu murni Rp. 28,214,069,600,- mengalami perubahan sebesar Rp. 27,042,712,778,- dikarenakan adanya penyesuaian tunjangan PNS serta penyesuaian gaji P3K (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).
  - 1.2 Fasilitas Kunjungan Tamu semula pagu murni Rp. 110,302,000,- mengalami pengurangan saat perubahan menjadi Rp. 77,192,000,- dikarenakan adanya pergeseran untuk rehabilitasi Gedung/kantor.
  - 1.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula pagu murni Rp. 813,068,000,- mengalami

pengurangan saat perubahan menjadi Rp. 642,088,000,- dikarenakan adanya efisiensi untuk honorarium pegawai ttidak tetap (honorer) dan digeserkan untuk rehabilitasi Gedung/kantor.

- 1.4 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semula Rp. 1.500.000.000,- bertambah menjadi Rp. 2.351.619.000,- yang merupakan penambahan dari pergeseran anggaran untuk pembelian tanah pertanian.
2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SARANA PERTANIAN pada sub kegiatan:
  - 2.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi semula pagu murni Rp. 349,596,950,- mengalami penambahan saat perubahan menjadi Rp. 468,220,950,- dikarenakan adanya rencana dana insentif inflasi daerah dari kementrian keuangan.
  - 2.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian semula pagu murni Rp. 1,425,894,400,- mengalami pengurangan saat perubahan menjadi Rp. 390,425,400,- dikarenakan adanya pergeseran untuk pembelian lahan pertanian.
3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN pada sub kegiatan:
  - 3.1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B semula pagu murni Rp.790.000.000,- mengalami penambahan pada perubahan menjadi Rp. 1,153,100,000,- dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Harum Madu bagi hadiah perlombaan.
  - 3.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani semula pagu murni Rp. 5,214,000,000,- mengalami penambahan saat perubahan menjadi Rp. 5,289,000,000,- dikarenakan adanya penambahan

anggaran untuk kegiatan dari dana insentif inflasi.

4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN pada sub kegiatan:

4.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan semula pagu murni Rp. 207,177,500,- mengalami penambahan saat perubahan menjadi Rp. 288,737,500,- dikarenakan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan dari dana insentif inflasi.

4.2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan semula pagu murni Rp. 242,822,500,- mengalami pengurangan menjadi Rp. 224,062,500,- dikarenakan adanya pergeseran sub kegiatan.

5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN pada sub kegiatan:

5.1 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian semula pagu murni Rp. 295,000,000,- mengalami pengurangan menjadi Rp. 213,760,000,- dikarenakan adanya pergeseran sub kegiatan.

6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN pada sub kegiatan:

6.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa semula Rp. 1,229,750,000,- menjadi Rp. 971,750,000,- dikarenakan adanya pergeseran untuk pembelian lahan Pertanian.

Untuk penyelenggaraan program dan kegiatan perubahan Tahun 2023 penganggarnya disusulkan melalui beberapa sumber pendanaan, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta Dana Insentif Inflasi dari Kementerian Keuangan.

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten

Garut guna tercapainya program pembangunan pada Perubahan Rencana Kerja dalam dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut:

**Tabel 3.1.. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Garut  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27									116,236,305,000	80,448,885,752	79,158,113,330			106,852,642,000								
3	27	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	%		%	100 %	100 %	32,068,305,000	32,602,693,515	32,078,865,693			100 %	33,688,142,000				
3	27	1	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan dan umum	%		%	100 %	100 %	661,500,000	181,400,000	181,400,000			100 %	708,495,000				
3	27	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	125,840,000	106,400,000	106,400,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian Kabupaten Garut	3 Dokumen	138,424,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.01	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60,500,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian Kabupaten Garut	1 Dokumen	66,550,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.01	3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	60,500,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian Kabupaten Garut	2 Dokumen	66,550,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.01	4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian Kabupaten Garut	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pertanian

3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	92,610,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian Kabupaten Garut	2 Dokumen	97,241,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	66,550,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pertanian Kabupaten Garut	3 Laporan	73,205,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	220,500,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian Kabupaten Garut	3 Laporan	231,525,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji/Tunjangan	Orang		Orang	200 Orang	200 Orang	26,469,450,000	28,214,069,600	27,042,712,778							200 Orang	27,792,923,000	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	26,469,450,000	28,214,069,600	27,042,712,778	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian Kabupaten Garut	200 Orang/bulan	27,792,923,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Tenaga Kemanan	Orang		Orang	7 Orang	7 Orang	212,783,500	370,479,772	370,479,772							7 Orang	223,422,000	
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	212,783,500	370,479,772	370,479,772	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	223,422,000	Dinas Pertanian	

														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
3	27	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%		%	100 %	100 %	740,880,000	134,253,300	134,253,300				100 %	777,924,000			
3	27	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	138,915,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Unit	145,861,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	11,576,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	12,155,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	167,856,000	76,500,000	76,500,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	176,248,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	115,763,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih				0	3 Dokumen	121,551,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	115,762,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	15 Orang	121,551,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				420 Orang	420 Orang	86,822,000	57,753,300	57,753,300	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	420 Orang	91,163,000	Dinas Pertanian

3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				420 Orang	420 Orang	104,186,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	420 Orang	109,395,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%	%	100 %	100 %	704,058,000	1,134,795,403	930,705,403							100 %	741,762,000	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17,364,000	17,616,500	17,616,500	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	18,233,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150,491,000	106,758,303	106,758,303	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	158,016,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57,881,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	60,775,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63,669,000	58,453,400	58,453,400	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	66,853,000	Dinas Pertanian

3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	57,881,000	28,597,200	28,597,200	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	60,775,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28,941,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Paket	30,388,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	115,763,000	110,302,000	77,192,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	121,551,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	162,068,000	813,068,000	642,088,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Laporan	170,171,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pertanian
3	27	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%		%	100 %	100 %	<b>2,282,506,000</b>	<b>1,636,424,600</b>	<b>2,488,043,600</b>						100 %	<b>2,396,630,000</b>	
3	27	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	405,169,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	3 Unit	425,427,000	Dinas Pertanian

3	27	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	231,525,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	3 Unit	243,101,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	173,644,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	10 Unit	182,326,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	57,880,000	136,424,600	136,424,600	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	5 Unit	60,775,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	810,338,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Unit	850,854,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	603,950,000	1,500,000,000	2,351,619,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	2 Unit	634,147,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%		%	100 %	100 %	<b>301,975,000</b>	<b>321,017,840</b>	<b>321,017,840</b>							100 %	<b>317,074,000</b>	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,473,000	3,306,000	3,306,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Laporan	3,647,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	144,703,000	137,805,090	137,805,090	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	12 Laporan	151,938,000	Dinas Pertanian	



3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	17,364,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian	10 Unit	18,233,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	173,644,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian	4 Unit	182,326,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	173,644,000	448,935,000	448,935,000	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pertanian	4 Unit	182,326,000	Dinas Pertanian	
3	27	1	2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Persentasi pelayanan administrasi keuangan dan umum	%	%		100 %	100 %	<b>104,765,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						100 %	<b>110,003,000</b>		
3	27	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	104,765,000	0	0	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	0	300 Paket	110,003,000	Dinas Pertanian	
3	27	2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Indeks Ketersediaan Sarana yang sesuai peruntukannya	poin	poin		0.125 poin	0.125 poin	<b>19,165,000,000</b>	<b>2,278,600,000</b>	<b>1,361,755,000</b>						0.125 poin	<b>17,011,500,000</b>		
3	27	2	2.01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Jumlah Pengawasan	Kegiatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	<b>11,535,000,000</b>	<b>1,775,491,350</b>	<b>858,646,350</b>							1 Kegiatan	<b>9,000,000,000</b>	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Bantuan Sarana Produksi				3 Jenis	3 Jenis	6,135,000,000	349,596,950	468,220,950	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	3 Jenis	4,500,000,000	Dinas Pertanian	

					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Laporan	0 Laporan			Kab. Garut, Tarogong Kaler, Jati	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				0 Laporan	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan			Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Laporan	
													Kab. Garut, Banyuresmi, Bagendit	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
													Kab. Garut, Kadungora, Semua Kelurahan Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun Kab. Garut, Cibatu, Sukalilah Kab. Garut, Cibatu, Karyamukti Kab. Garut, Malangbong, Baru Dua Kab. Garut, Bayongbong, Cinisti Kab. Garut, Cisurupan, Simpangsari Kab. Garut, Sukaresmi, Cintadamai Kab. Garut, Sukaresmi, Sukalilah Kab. Garut, Cikajang, Cikajang Kab. Garut, Cikajang, Simpang Kab. Garut, Cikajang, Cikandang						

3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bibit kol				1 Paket	1 Paket	5,400,000,000	1,425,894,400	390,425,400	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Paket	4,500,000,000	Dinas Pertanian
						Jumlah bibit palawija				1 paket	1 paket				Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango					1 paket		
						Jumlah bibit tanaman pangan dan hortikultura				5 Jenis	5 Jenis				Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas					5 Jenis		
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan				Kab. Garut, Leles, Margaluyu					1 Laporan		
						Jumlah sarana produksi kentang				2 paket	2 paket				Kab. Garut, Karangtengah, Cintamanik					2 paket		
															Kab. Garut, Cisarupan, Kramatwangi							
															Kab. Garut, Cisarupan, Pamulihan							
															Kab. Garut, Cikajang, Mekarjaya							
															Kab. Garut, Cikajang, Cipangramatan							
															Kab. Garut, Mekarmukti, Semua Kelurahan							
															Kab. Garut, Cisewu, Cisewu							
															Kab. Garut, Cibiuk, Lingkungpasir							
3	27	2	2.02		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7,630,000,000	503,108,650	503,108,650						1 Kegiatan	8,011,500,000	
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				1 Dokumen	1 Dokumen	2,123,500,000	197,827,400	197,827,400	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	2,229,675,000	Dinas Pertanian

3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	4,101,500,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Dokumen	4,306,575,000	Dinas Pertanian
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	1,405,000,000	155,281,250	155,281,250	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Dokumen	1,475,250,000	Dinas Pertanian
3	27	3			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Indeks Ketersediaan Prasarana yang sesuai peruntukannya	poin	poin	0.103 poin	0.103 poin	57,068,000,000	32,579,350,000	33,017,450,000						0.103 poin	48,628,000,000		
3	27	3	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang Dikelola	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,268,000,000	790,000,000	1,153,100,000						1 Kegiatan	1,628,000,000	
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	415,000,000	790,000,000	1,153,100,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Non Fisik			0	1 Dokumen	503,500,000	Dinas Pertanian



3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara			20 Unit	20 Unit	9,550,000,000	5,214,000,000	5,289,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Garut, Banyuresmi, Karyasari  Kab. Garut, Pasirwangi, Semua Kelurahan Kab. Garut, Malangbong, Sakawayang Kab. Garut, Malangbong, Cilampuyang Kab. Garut, Bayongbong, Sukamanah Kab. Garut, Cigedug, Cigedug Kab. Garut, Sukaresmi, Cintadamai Kab. Garut, Cibalong, Sagara Kab. Garut, Cikelet, Kertamukti Kab. Garut, Pakenjeng, Panyindangan Kab. Garut, Bl. Limbangan, Surabaya Kab. Garut, Selaawi, Cirapuhan  Kab. Garut, Selaawi, Mekarsari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	20 Unit	5,550,000,000	Dinas Pertanian
---	----	---	------	---	--	--	--	--	---------	---------	---------------	---------------	---------------	--	--	---	--	---	---------	---------------	-----------------

3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5,350,000,000	114,000,000	114,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit  0 Unit	5,550,000,000	Dinas Pertanian
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				21 Unit	21 Unit	12,450,000,000	4,367,000,000	4,367,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Garut, Wanaraja, Sindangmekar  Kab. Garut, Tarogong Kaler, Jati Kab. Garut, Tarogong Kaler, Panjiwangi Kab. Garut, Banyuresmi, Sukaraja Kab. Garut, Kadungora, Hegarsari  Kab. Garut, Kersamanah, Sukamerang Kab. Garut, Kersamanah, Sukamaju Kab. Garut, Malangbong, Sakawayang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	21 Unit	5,550,000,000	Dinas Pertanian

															Kab. Garut, Malangbong, Sukamanah Kab. Garut, Malangbong, Baru Dua Kab. Garut, Bayongbong, Hegarmanah Kab. Garut, Bayongbong, Cielia Kab. Garut, Bayongbong, Simagalih Kab. Garut, Bayongbong, Sukarame Kab. Garut, Cibalong, Mekar Mukti Kab. Garut, Cibalong, Cigaronggong Kab. Garut, Bl. Limbangan, Neglasari Kab. Garut, Bl. Limbangan, Simpen Kaler Kab. Garut, Bl. Limbangan, Pasirwaru Kab. Garut, Selaawi, Cirapuhan							
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5,350,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit	5,550,000,000	Dinas Pertanian
3	27	3	2.02	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	450,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit	650,000,000	Dinas Pertanian
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	725,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit	950,000,000	Dinas Pertanian

3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	1 Unit	225,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit	275,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	1 Unit	21,700,000,000	22,094,350,000	22,094,350,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Hibah dari Pemerintahan Pusat DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusahaan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Unit	22,925,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana	%	%	10 %	10 %	<b>968,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>512,800,000</b>						10 %	<b>1,019,000,000</b>		
3	27	5	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	Ha	5000 Ha	5000 Ha	<b>968,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>512,800,000</b>							5000 Ha	<b>1,019,000,000</b>	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)			5000 Ha	5000 Ha	320,000,000	207,177,500	288,737,500	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri,	0	5000 Ha	340,000,000	Dinas Pertanian	

						Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan									Umum	Bencana Dan Perubahan Iklim	perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya					
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			5000 Ha	5000 Ha	220,000,000	242,822,500	224,062,500	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	5000 Ha	230,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			5000 Ha	5000 Ha	108,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	5000 Ha	119,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	5	2.01	4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis			1 Laporan	1 Laporan	160,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Laporan	165,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	5	2.01	5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			1 Laporan	1 Laporan	160,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Laporan	165,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	6			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Pertanian yang diberikan	%	%	50 %	50 %	<b>1,005,000,000</b>	<b>295,000,000</b>	<b>213,760,000</b>						50 %	<b>280,000,000</b>		
3	27	6	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>1,005,000,000</b>	<b>295,000,000</b>	<b>213,760,000</b>							1 Dokumen	<b>280,000,000</b>	
3	27	6	2.01	1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Publik			16 Dokumen	16 Dokumen	45,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua	Dana Transfer		5. Peningkatan nilai tambah	0	16 Dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian	

					Permit Izin Usaha Pertanian	Permit Izin Usaha Pertanian								Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya				
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			1 Dokumen	1 Dokumen	170,000,000	295,000,000	213,760,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	1 Dokumen	180,000,000	Dinas Pertanian
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Alat Pengolahan Kopi  Huller  Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Penggilingan padi			6 Unit	6 Unit	790,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pasawahan Kab. Garut, Kadungora, Cikembulan  Kab. Garut, Malangbong, Cisitu Kab. Garut, Cikajang, Cikajang Kab. Garut, Cikajang, Padasuka Kab. Garut, Mekarmukti, Jayabaya Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	6 Unit  1 Unit  1 Laporan  1 Unit	50,000,000	Dinas Pertanian

3	27	7			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Prosentase peningkatan Penyuluh yang tersertifikasi	%		%	10 %	10 %	5,962,000,000	12,243,242,237	11,973,482,637			10 %	6,226,000,000				
3	27	7	2.01		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%		%	5 %	5 %	5,962,000,000	12,243,242,237	11,973,482,637			5 %	6,226,000,000				
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				42 Unit	42 Unit	2,300,000,000	1,229,750,000	971,750,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	42 Unit	2,396,000,000	Dinas Pertanian
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				42 Unit	42 Unit	1,400,000,000	944,190,237	934,200,237	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	42 Unit	1,425,000,000	Dinas Pertanian

3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			42 Unit	42 Unit	1,075,400,000	9,669,302,000	9,667,532,400	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusahaan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	42 Unit	1,150,000,000	Dinas Pertanian
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk			42 Unit	42 Unit	302,000,000	0	0	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	42 Unit	335,000,000	Dinas Pertanian
3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			42 Unit	42 Unit	884,600,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	0	42 Unit	920,000,000	Dinas Pertanian
<b>TOTAL</b>											<b>116,236,305,000</b>	<b>80,448,885,752</b>	<b>79,158,113,330</b>						<b>106,852,642,000</b>		

Sumber : SIPD 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari s/d 31 Desember 2023 meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 meliputi pembangunan infrastruktur pertanian guna meningkatkan Indeks Pertanaman yang didukung oleh pemenuhan kebutuhan sarana produksi pertanian, perlindungan gangguan usaha pertanian, perijinan dan pasca panen serta dukungan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan penyuluhan.

Apabila anggaran yang diusulkan tidak memenuhi maka akan berdampak pada capaian sasaran kegiatan yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan unggulan tidak akan tercapai secara optimal.

#### **5.2. Kaidah Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun atas dasar sinergitas dan sinkronisasi kegiatan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, RKPD Kabupaten Garut serta Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Garut.

### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

- a. Diperlukan sinergitas antar stakeholder untuk mewujudkan pembangunan pertanian seperti dukungan koordinasi dari Asisten Perkenomian dan Pembangunan juga Bappeda serta kerjasama program kegiatan dari SKPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM, Dinas Koperasi, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Adanya peningkatan pengetahuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta sarana pendidikan lainnya.
- c. Aktif dalam mencari sumber dana diluar dana APBD II, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai APBD II bisa dibantu dari sumber dana yang lain.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Garut Tahun 2023 ini menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dibidang pertanian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut “Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera”.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN